

## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Depok Tahun 2021. Ringkasan LPPD ini disusun untuk memenuhi amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

### 1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja makro Pemerintah Kota Depok sebagaimana tabel 1.

**Tabel 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Depok**

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,97	81,37	0,49%
2	Angka Kemiskinan	2,45%	2,58%	5,31%
3	Angka Pengangguran	9,87%	9,76%	-1,11%
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,92%	3,76%	295,83%
5	Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita	28.336,46	35.655,119	25,83%
6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	0,344	0,367	6,69%

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2020-2021

Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Aspek Makro yang berpengaruh besar pada aspek kesejahteraan dimasyarakat, menunjukkan kecenderungan membaik pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai

indikator utama keberhasilan pembangunan pada tahun 2021 sebesar 81,37% meningkat 0,49% dari nilai IPM tahun 2020 yaitu sebesar 80,97. Kenaikan nilai IPM ini didorong oleh naiknya nilai komponen-komponen penyusun IPM. Nilai IPM Kota Depok merupakan tertinggi ketiga di provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung (81,96) dan Kota Bekasi (81,95).

Persentase angka kemiskinan meningkat sebesar 0,13% dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 2,45%, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 2,58%. Meskipun mengalami kenaikan, namun tingkat kemiskinan di Kota Depok merupakan yang terendah di Jawa Barat.

Untuk tingkat pengangguran apabila disandingkan dengan data tahun 2020, juga mengalami penurunan sebesar 0,11%. Tingkat pengangguran pada tahun 2020 adalah sebesar 9,87% dan pada tahun 2021 sebesar 9,76%. Hal ini menunjukkan perekonomian di Kota Depok mulai tumbuh setelah sebelumnya terpuruk akibat pandemi covid-19, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Sementara laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok untuk tahun 2021 ini adalah sebesar 3,76%, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -1,92%. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Depok sudah mulai bangkit meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi.

Demikian halnya dengan Pendapatan per Kapita yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro juga mengalami kenaikan. PDRB per kapita ADHB Kota Depok pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.35.655.120,00. Nilai ini lebih besar dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp28.336.460,00. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, yang menandakan bangkitnya perekonomian di Kota Depok yang

berdampak pula pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk di Kota Depok.

Sementara ketimpangan pendapatan, untuk Nilai Indeks Gini Ratio Kota Depok Tahun 2021 adalah sebesar 0,367 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Nilai ini lebih tinggi 0,023 poin dibanding nilai tahun 2020 sebesar 0,344. Peningkatan ini menunjukkan perbedaan ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat menengah keatas yang semakin melebar.

## **2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2021**

Sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Adapun urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pada masing-masing urusan pelayanan dasar dimaksud.

## 1. Urusan Pendidikan

Pada urusan pendidikan terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD ; dengan capaian sebesar 56,318%, dimana dari **63.742** orang penduduk usia 5-6 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak **35.898** orang yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar ; dengan capaian 102,94%, dimana dari **199.406** penduduk usia 7-12 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak **205.267** orang yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar.
- c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dengan capaian 92,32%, dimana dari **100.128** orang penduduk usia 13-15 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak **92.440** orang yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama di Kota Depok.
- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan ; dengan capaian 12,42%, dimana dari **84.713** orang penduduk usia 7-18 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak **10.522** orang yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan capaian pada indikator tersebut tersebut, diketahui beberapa capaian yang belum optimal diantaranya capaian pada tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD capaiannya rendah dikarenakan sebagian besar warga negara yang berpartisipasi dalam PAUD merupakan usia 5 tahun ke bawah. Demikian halnya dengan tingkat partisipasi

warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, hal ini dapat disebabkan kurangnya informasi terhadap pendidikan kesetaraan yang sebenarnya menjadi salah satu indikator dalam pelayanan dasar di bidang pendidikan.

## 2. Urusan Kesehatan

Pada urusan kesehatan terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Rasio daya tampung RS rujukan terhadap Jumlah Penduduk dengan capaian sebesar 0,168;
- b. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi dengan capaian sebesar 58,33%;
- c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian sebesar 96,30%;
- d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan capaian sebesar 98,27%;
- e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian sebesar 100,84%;
- f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan capaian sebesar 97,09%;
- g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 40,37%;
- h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 47,44%;
- i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 46,67%;

- j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 32,58%;
- k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 100,80%;
- l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan capaian sebesar 44,83%;
- m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dengan capaian sebesar 36,12%.
- n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dengan capaian sebesar 44,83%;

Beberapa indikator capaian pada urusan kesehatan masih belum optimal yaitu Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, hal ini disebabkan selama pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka sehingga penjangkaran kesehatan dan skrining tidak bisa dilakukan secara langsung. Selanjutnya pada pelayanan kesehatan terhadap kelompok lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) juga belum optimal capaiannya dikarenakan adanya pembatasan kegiatan terhadap kelompok usia tersebut. Adapun pelayanan terhadap warga negara usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar juga mengalami pembatasan kegiatan skrining dan menurunnya jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Untuk pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) juga belum optimal dikarenakan pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik. Sementara untuk pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat capaiannya juga rendah, karena disamping pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik

juga kunjungan kesehatan jiwa selama pandemi menurun drastis dikarenakan pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas. Kondisi pandemi juga menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap orang terduga Tuberkulosis menjadi terbatas. Karena terbatasnya kegiatan tracking terhadap orang terduga Tuberkulosis, selain itu juga disebabkan terbatasnya puskesmas yang belum terlatih metode DOTS dan terbatasnya RS yang juga belum menggunakan metode DOTS dan belum melaporkan menggunakan SITB.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada urusan Pekerjaan Umum terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota, dengan capaian sebesar 19,457%;
- b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota, dengan capaian 0%;
- c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi , dengan capaian 0%;
- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dengan capaian sebesar 81,90%;
- e. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian sebesar 98,728%;
- f. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota dengan capaian sebesar 100%;
- g. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota dengan capaian sebesar 87,318%



- h. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian sebesar 26,1%;
- i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan capaian sebesar 0%;

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat

Pada urusan Perumahan Rakyat terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
- b. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dengan capaian sebesar 0%;
- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani dengan capaian 0%;
- d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan capaian 0,944%;
- e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan capaian 0,02%.

#### 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian sebesar 97,87%
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan capaian sebesar 71,43%;
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 220 orang;

- d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 56.700 orang;
- e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 100 %;
- f. Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran yaitu 06.50 detik.

#### 6. Urusan sosial

Pada urusan sosial terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) dengan capaian 100%;
- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.



### 3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

#### a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi terhadap LPPD Kota Depok tahun 2020 oleh Tim Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

##### 1) Tataran Indeks Makro

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 6 IKK

##### 2) Tataran Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 41 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi sebanyak 0 IKK. Terdapat 12 IKK pada LPPD yang telah disampaikan

yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

3) Tataran Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 46 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi sebanyak 0 IKK. Terdapat 27 IKK pada LPPD yang telah disampaikan yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

4) Tataran Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 19 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi sebanyak 0 IKK. Terdapat 10 IKK pada LPPD yang telah disampaikan yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

5) Tataran Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Penunjang

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 18 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi sebanyak 0 IKK. Terdapat 11 IKK pada LPPD yang telah disampaikan yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

**b. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Depok mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran *un audited* th 2021, Pendapatan Kota Depok pada Tahun Anggaran 2021 pada APBD murni tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.078.409.946.792 sedangkan dalam penyusunan anggaran perubahan tahun 2021 sebesar Rp3.219.626.075.377 atau mengalami kenaikan sebesar Rp141.216.128.585 atau sebesar 4,59% dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 adalah Rp 3.396.023.151.732 atau terealisasi 105,48% dari target sebesar Rp 3.219.626.075.377. Sementara Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.267.620.863.110 atau sebesar 88,87% dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp3.676.759.990.653.

#### 5. Inovasi Daerah

Kebijakan inovasi adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh perangkat litbang daerah dalam menumbuhkan budaya inovasi di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah. Inovasi memiliki peran penting sebagai akselerator untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif, dalam mendukung terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Untuk mendukung perkembangan inovasi di daerah, pemerintah perlu membangun suatu ekosistem yang disebut sebagai Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang terdiri dari penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya kelitbangan dan jejaring. Fokus pengembangan SIDa pada tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah memperkuat regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah.

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Depok yang berisikan pedoman kebijakan penguatan SIDa, Penataan unsur SIDa dan pengembangan SIDa. Selain itu sebagai tindak lanjut peraturan dalam hal membangun unsur kelembagaan atau organisasi, telah dibentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kota Depok yang

beranggotakan pimpinan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menumbuhkan inisiatif inovasi perangkat daerah.

Melalui kegiatan pemetaan dan evaluasi inovasi perangkat daerah tahun 2020 diperoleh data sebagai berikut:

1. Jumlah inovasi terdata sebanyak 40 (empatpuluh) inovasi, dengan jumlah perangkat daerah pelapor sebanyak 17 (tujuhbelas).
2. Status tahapan inovasi terdiri dari: 4 (empat) inisiatif, 8 (delapan) uji coba dan 28 (duapuluh delapan) penerapan.
3. Bentuk inovasi: inovasi pelayanan publik sebanyak 21 (duapuluh satu) atau 52,5%, inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebanyak 8 (delapan) atau 20% dan inovasi daerah lainnya sebanyak 11 (sebelas) atau 27,5%.
4. Jenis inovasi: 11 (sebelas) atau 27,5% inovasi digital, 11 (sebelas) atau 27,5% inovasi non digital dan 18 (delapanbelas) teknologi atau 45%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, Kota Depok memperoleh skor indeks inovasi daerah sebesar 41,52 dengan predikat Inovatif.

**Tabel 2 Nama Inovasi Tahun 2021**

Perangkat Daerah (1)	No (2)	Nama Inovasi Daerah (3)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok	1	KMob Depok
	2	Optimalisasi Netralitas ASN melalui Penyediaan Buku Panduan Elektronik pada Pemerintah Kota Depok
	3	SIAPKOMPAK
	4	SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN MUTASI (SITAMU) PADA BKPSDM KOTA DEPOK
	5	SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN MUTASI

Perangkat Daerah (1)	No (2)	Nama Inovasi Daerah (3)
		(SITAMU) PADA BKPSDM KOTA DEPOK
Badan Keuangan Daerah Kota Depok	6	Easy Tax
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok	7	Infrastruktur Data Spasial Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok	8	e-Perpus Kota Depok
	9	JELITA DEPOK ;Jejaring Literasi Kota Depok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	10	SILONDO (Sistem Layanan Online Dukcapil Depok)
Dinas Kesehatan Kota Depok	11	E-Rapor Kesehatan
	12	Portal Puskesmas
	13	Portal Smart Healthy city
	14	Pusat Informasi Covid-19 Kota Depok (PICODEP)
	15	Sistem Informasi Pemetaan Profil Kesehatan Lingkungan (SIPPKLING)
	16	SJP Online
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok	17	Naciperfa falimruta
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	18	Aplikasi Hibah dan Bansos (BERBAGI)
	19	Aplikasi Hitung Suara – HITUNG SUARA
	20	Aplikasi Manajemen Inovasi Smart City Depok (IDEA)
	21	Aplikasi Ruang Terbuka Publik (Hai Depok)
	22	Depok Single Window
	23	Helpdesk
	24	Pusat Data Terintegrasi Kota Depok (DataWarehouse)

Perangkat Daerah (1)	No (2)	Nama Inovasi Daerah (3)
	25	Simolek-Helpdesk Layanan Aptika
	26	Sistem Informasi Monitoring Aplikasi Terintegrasi Automatis e-Gov "SIMATA e-Gov
	27	Sistem Layanan Online Kelurahan dan Kecamatan Kota Depok (SiLO)
	28	Sistem Pengelolaan Layanan TIK (SIMPATIK)
	29	Smart Portal Kecamatan
	30	Smart Portal Kelurahan Kota Depok
	31	Smart Portal Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok	32	D'Co Mart
	33	Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi Sektor Perdagangan d'Co Mart
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok	34	Aplikasi Absensi E-KPT
	35	Program kampung Iklim (PROKLIM)
	36	Waste to Energy
Dinas Pehubungan Kota Depok	37	Integrasi Sistem Jaringan Antar Moda Transportasi Angkutan Online Dengan Jabodetabek Residence Connexion (JRC) di Kota Depok
	38	Pemerataan Lahan Parkir UPT PKB
	39	SIMPKB
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok	40	Webgis Ke Pu-an
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Depok	41	Aplikasi 113
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok	42	Taman Musik Depok ( TAMUDE )



<b>Perangkat Daerah</b> (1)	<b>No</b> (2)	<b>Nama Inovasi Daerah</b> (3)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	43	Sistem Informas Promosi Investasi Online (SIPION) Kota Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok	44	Inovasi Aplikasi Manajemen Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos (Aplikasi e-Hisos)
	45	PENGGUNAAN MEDIA SISWA KEPO UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA
	46	Sistem Informasi Smart Education Depok (SISEDEP)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok	47	DigiCash (Transaksi Non Tunai) di pasar Sukatani
	48	REVITALISASI MANAJEMEN (KOMODITI IKAN HIAS) PASAR RAKYAT MUSI KOTA DEPOK MELALUI PROMOSI VIRTUAL DI MEDIA SOSIAL
	49	Simdagin ( Sistem Informasi Perdagangan dan Perindustrian
Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok	50	Penyusunan Instrumen Monitoring & Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Dinas perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok
	51	Sekolah Ayah Bunda
	52	Sekolah Pra Nikah
	53	SIMORA (Sistem Edukasi Mobil Ramah Anak)
	54	Sistem Aplikasi Perlindungan Anak (SAPA) KLA
Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok	55	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
	56	MOU dengan S\Pengusaha Tinja Swasta
	57	Penanganan limbah domestik rumah tangga dengan pembangunan Septictank dan IPAL Pembangunan septic tank fabrikasi dengan

Perangkat Daerah (1)	No (2)	Nama Inovasi Daerah (3)
		standar nasional Optimalisasi program untuk mencapai open defecation free
Dinas Tenaga Kerja Kota Depok	58	Aplikasi Bursa Kerja Online (BKOL) Berbasis website dan mobile Apps
	59	SIMPEL (Sistem Informasi Pelatihan)
Inspektorat Daerah Kota Depok	60	Mitra Konsultasi
	61	SIMTLHP
	62	Sistem Mitra Konsultasi Inspektorat
	63	Sistem Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok	64	Sistem Informasi Pendataan dan Pencatatan Ormas
Kecamatan Beji	65	Antar Jemput Layanan bagi Lansia - ANJELLA
	66	Pojok Design dan Promosi Online - PODESPROMLINE
	67	Pustaka New Normal - PUNUK ONTA
	68	OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI “KAMPUNG JELITA” (JELANTAH UNTUK LINGKUNGAN KITA) DI KELURAHAN DURENSERIBU KECAMATAN BOJONGSARI KOTA DEPOK
Kecamatan Cimanggis	69	Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) Melalui Pendampingan Pada Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok	70	Pengembangan Pelayanan RSUD Kota Depok selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok	71	e-Patrol

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 **WALI KOTA DEPOK**  
)  
*[Handwritten signature]*  
**DR. KH. MOHAMMAD IDRIS, MA**